

**STUDI KORELASI TINGKAT PENGETAHUAN BIDAN PRAKTIK SWASTA
DI KABUPATEN BANTUL DENGAN KELENGKAPAN PARTOGRAF DAN
KEWENANGANNYA MEMAPARKAN ISI REKAM MEDIS**

Tesis S-2

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh Derajat Sarjana S2
Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2007

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis-S2

STUDI KORELASI TINGKAT PENGETAHUAN BIDAN PRAKTIK SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA KELENGKAPAN PARTOGRAF DAN KEWENANGANNYA MEMAPARKAN ISI REKAM MEDIS



Valentinus Suroto, S.H., M.Hum.

tanggal 9 Maret 2007

Penguji

Prof. Dr. A. Widanti S., S.H., C.N.

tanggal 9 Maret 2007

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemagisterian di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Semarang, 9 Maret 2007
Hormat saya,

Sulistyaningsih, S.KM



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga kita tetap dalam keadaan Iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabiin yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Berkah rahmat dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian untuk tesis yang berjudul *Studi Korelasi Tingkat Pengetahuan Bidan Praktik Swasta Di Kota Bantul dengan Kelengkapan Partograf dan Kewenangannya Memaparkan Isi Rekom Medis*.

Penyusunan laporan penelitian ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan dan pengarahan dari semua pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. dr. Hj. Siti Dawiesah, M.Sc., selaku Ketua STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menempuh studi S2 Magister Hukum Kesehatan;
2. Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N., selaku Ketua Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata dan penguji tesis
3. dr. Bambang Shofari, MARS, dan Valentinus Suroto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penyusunan tesis yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan masukan;
4. Seluruh dosen dan karyawan Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata;
5. Ketua IBI Daerah Propinsi DIY yang telah memberikan ijin untuk pelaksanaan penelitian;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data;
7. Ketua IBI Kabupaten Bantul beserta dengan seluruh pengurusnya yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengumpulan data;
8. Para Bidan Praktik Swasta (BPS) di Kabupaten Bantul yang telah bersedia menjadi responden penelitian;
9. Ibu, Ayah, Kakak, Muma dan Aufa serta keluarga saya yang menjadi penyemangat penulis;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan laporan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganti yang lebih baik dari Allah SWT. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan laporan penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Maret 2007

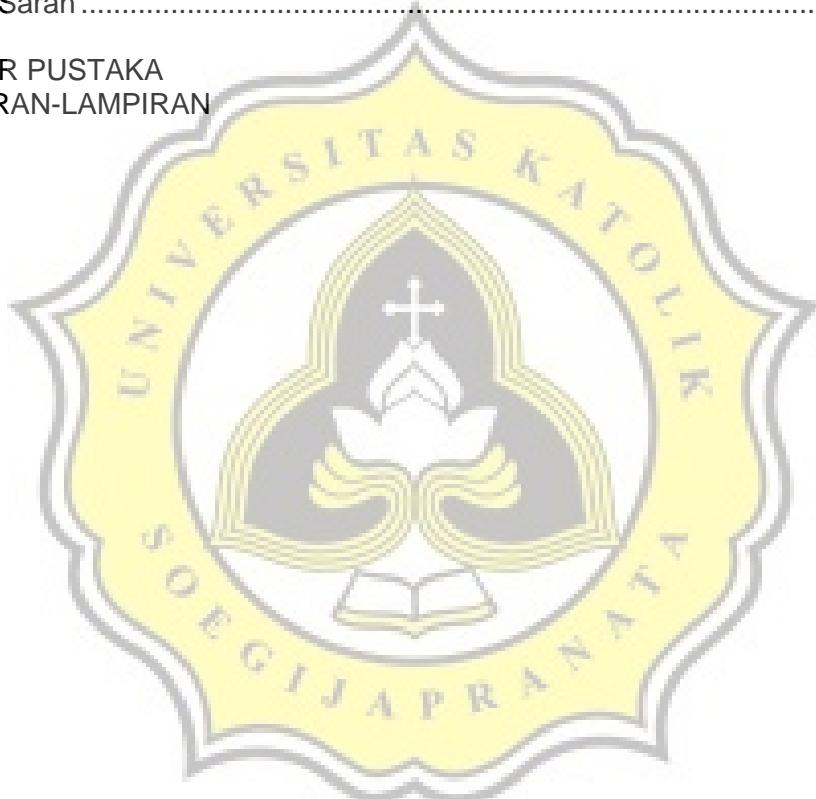
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Bidan praktik swasta.....	9
2. Rekam medis.....	12
3. Kelengkapan partografi	28
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan partografi	35
B. Kerangka Teori	39
C. Hipotesis.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	41
B. Spesifikasi Penelitian.....	41
C. Jenis Data.....	41
D. Desain Penelitian.....	43
E. Variabel dan Definisi Operasional	44
F. Metoda Pengumpulan Data	46
G. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel.....	49
H. Metoda Analisis data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	52
1. Tingkat pendidikan responden.....	52
2. Tingkat pengetahuan responden	53
3. Kelengkapan partografi	56
4. Hubungan tingkat pendidikan BPS dengan kelengkapan partografi	62

5.	Hubungan tingkat pengetahuan BPS dengan kelengkapan partografi..	64
B.	Pembahasan.....	65
	1. Tingkat pengetahuan responden tentang RM	65
	2. Kelengkapan partografi	80
	4. Hubungan tingkat pendidikan BPS dengan kelengkapan partografi	90
	5. Hubungan tingkat pengetahuan BPS dengan kelengkapan partografi..	93
	6. Kewenangan BPS untuk memaparkan isi RM.....	95
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan.....	100
B.	Saran	102

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

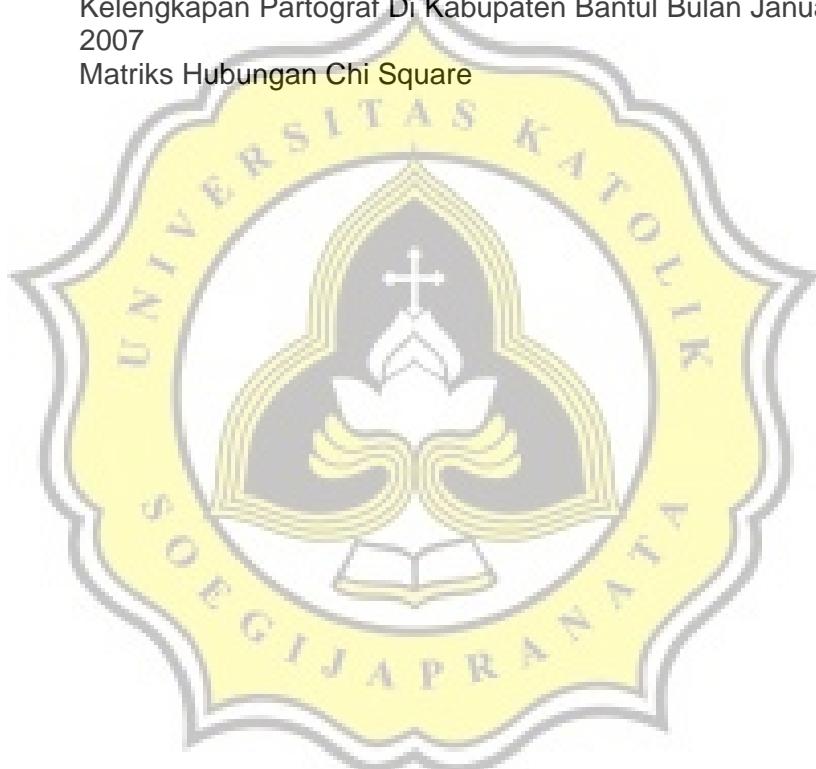


DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Konsep Korelasi Tingkat Pengetahuan BPS dengan Kelengkapan Partografi dan Kewenangannya Memaparkan Isi Rekam Medis	39
Gambar 2	Hubungan Antar Variabel	44
Gambar 3	Diagram Pie Tingkat Pendidikan BPS Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	53
Gambar 4	Diagram Pie Tingkat Pengetahuan Responden Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	54
Gambar 5	Diagram Batang Tingkat Pengetahuan BPS tentang RM Berdasarkan Aspek Penilaian dalam Kuesioner Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	55
Gambar 6	Diagram Pie Kelengkapan Partografi yang Dibuat oleh Responden Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	56
Gambar 7	Diagram Batang Kelengkapan Partografi Berdasarkan Keempat Aspek Penilaian Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	57
Gambar 8	Diagram Persentase Kelengkapan Partografi Berdasarkan Keempat Aspek Penilaian Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	58
Gambar 9	Diagram Batang Pengisian Identitas pada Partografi yang dibuat oleh Responden Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	59
Gambar 10	Diagram Batang Pengisian Laporan yang Perlu pada Partografi yang dibuat oleh Responden Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	60
Gambar 11	Diagram Batang Pengisian Otentikasi pada Partografi yang dibuat oleh Responden Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	61
Gambar 12	Diagram Batang Pengisian Pencatatan yang Baik pada Partografi yang dibuat oleh Responden Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	62

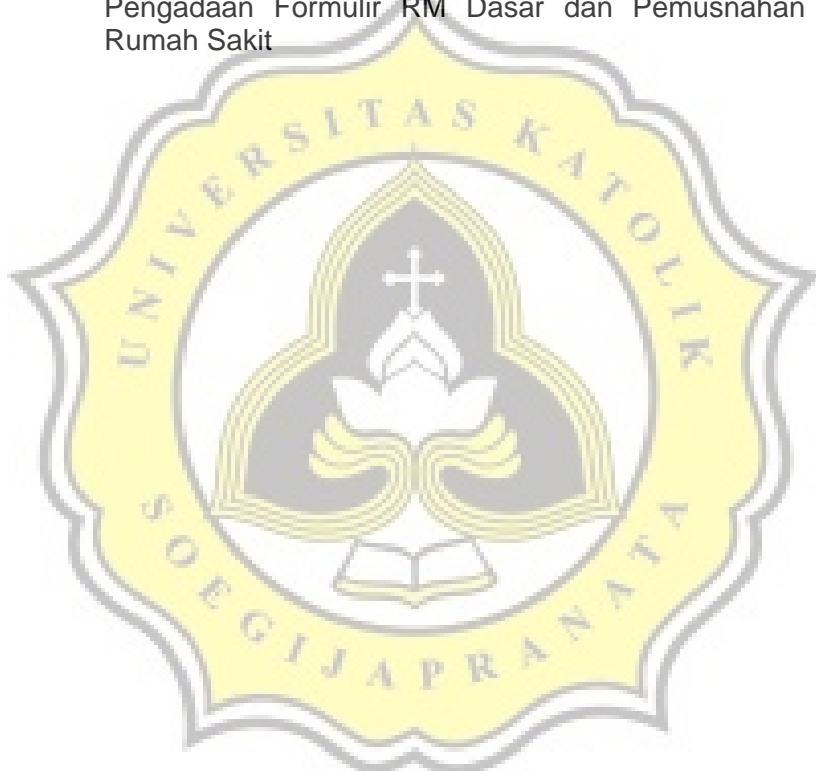
DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Kisi-kisi Kuesioner	47
Tabel 2	Distribusi Silang Tingkat Pendidikan Responden dengan Kelengkapan Partografi Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	63
Tabel 3	Matriks Hubungan Chi Square	63
Tabel 4	Distribusi Silang Tingkat Pengetahuan Responden dengan Kelengkapan Partografi Di Kabupaten Bantul Bulan Januari 2007	64
Tabel 5	Matriks Hubungan Chi Square	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
Lampiran 2 Lembar Partografi
Lampiran 3 Ijin Penelitian
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Lampiran 5 Rekapitulasi Data Mentah
Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis
Lampiran 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medis Nomor Hk.00.06.1.5.01160 tanggal 21 Maret 1995 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir RM Dasar dan Pemusnahan Arsip RM Di Rumah Sakit



DAFTAR SINGKATAN

AKI	: Angka Kematian Ibu
BKIA	: Balai Kesehatan Ibu dan Anak
BPS	: Bidan Praktik Swasta
Depkes	: Departemen Kesehatan
DJJ	: Denyut Jantung Janin
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
HIR	: Herziene Indonesisch Reglement
JNPKR	: Jaringan Nasional Pelatihan Kesehatan Reproduksi
Kepmenkes	: Keputusan Menteri Kesehatan
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPPerd	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Permenkes	: Peraturan Menteri Kesehatan
RBg	: Rechtsreglement voor de Buitengewesten
RM	: Rekam Medis
RS	: Rumah Sakit
S.E.	: Surat Edaran
SIK	: Sistem Informasi Kesehatan
SIPB	: Surat Ijin Praktik Bidan
SPK	: Standar Pelayanan Kebidanan
W.v.S	: Wetboek van Strafrecht

**Studi Korelasi Tingkat Pengetahuan Bidan Praktik Swasta Di Kabupaten
Bantul dengan Kelengkapan Partografi dan Kewenangannya
Memaparkan Isi Rekam Medis**

ABSTRAK

Rekam Medis (RM) termasuk salah satu bahan baku Sistem Informasi Kesehatan (SIK), yang merupakan sumber daya non fisik manajemen kesehatan, untuk memperoleh data/informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir guna pemantauan pelayanan medis paripurna. Pelayanan medis ini dapat dievaluasi sebagai kinerja medis termasuk Bidan Praktik Swasta (BPS). Belum ada data yang pasti mengenai partografi sebagai kelengkapan RM di Kabupaten Bantul, padahal Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten yang mempunyai AKI sangat rendah di Indonesia. Adanya pertentangan isi peraturan tentang kewenangan BPS dalam memaparkan isi RM untuk kepentingannya menghadapi perkara di bidang pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk diketahui: 1) tingkat pengetahuan BPS tentang RM; 2) hubungan tingkat pendidikan BPS dengan kelengkapan partografi; 3) hubungan tingkat pengetahuan BPS dengan kelengkapan partografi; 4) kewenangan BPS untuk memaparkan isi RM dalam kepentingannya menghadapi perkara di bidang pelayanan kesehatan.

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian inferensial. Responden penelitian ini adalah BPS di Kabupaten Bantul yang melayani pertolongan persalinan sebanyak 75 orang. Data diambil melalui pengisian angket yang sebelumnya dilakukan uji validitas dengan *product moment*, dan reliabilitas dengan *Split Half*. Data sekunder meliputi partografi dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian didapatkan tingkat pendidikan responden terbanyak adalah Diploma III Kebidanan sebanyak 38 orang (50%). Tingkat pengetahuan responden tentang RM sebagian besar adalah rendah sebanyak 34 orang (45%). Dari 75 responden, sebanyak 51 orang (68%) yang membuat partografi dan hanya 1 orang yang membuat partografi lengkap. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan chi Square didapatkan nilai signifikansi 0,00 artinya ada hubungan sangat signifikan antara tingkat pendidikan BPS dan kelengkapan partografi. Ada hubungan sangat signifikan antara tingkat pengetahuan BPS dan kelengkapan partografi ($p=0,00$). Berdasarkan interpretasi gramatikal dan sistematis serta atas *lex specialis derogat legi generalis* BPS berwenang untuk memaparkan isi RM dalam kepentingannya menghadapi perkara di bidang pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan kepada BPS untuk selalu meningkatkan tingkat pendidikan dan pengetahuannya, serta membuat partografi secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: pendidikan, pengetahuan, bidan praktik swasta, kewenangan, partografi

Correlation Study Of Midwife Private Practice Knowledge In Bantul Regency With Partograph Completeness And Authority Was To Flatten Medical Record

ABSTRACT

Medical Record (MR) as one of raw materials on the health information system, that was non physical resources of health management, to received accurate, complete and latest for data or information for the monitoring medical completed services. Medical services could in evaluation as medical achievement including Midwife Private Practice (MPP). Nothing accurate data about partograph as medical record completely in Bantul Regency, in fact that had the Maternal Mortality Rate (MMR) was very low in Indonesian. Have conflict of regulation contents about who could authority midwife private practice to opened information on medical record for interest the case in health services. The aim of this research was knew : 1) Level of knowledge MPP about MR; 2) Correlation level of education MPP with completeness partograph, 3) Correlaton level of knowledge MPP with completeness partograph, 3) The authority of MPP could to flatten MR for interest the case in health services

The research method used sosiological judicial approach with the specification of the inferensial research. The research respondent was MPP in Bantul regency that served midwifery care totaling 75 people. The data was taken through the fill in questionare that before was carried out by the validity test with Product moment, and realibility test with Split Half. The secondary data was covered partograph and the regulation.

Result of the research was level of education respondents most Diploma 3 Midwifery totaling 38 people (50%), level of knowledge about medical record most were low totaling 34 people (45%). From 75 respondents, totaling 51 people (68%) that made partograph and only one people made partograph completed. Based of hiphotetic test used Chi Square was obtained by the value of significant 0,00, the meaning that having correlations was very significants between level of education MPP with completeness partograph. There were correlations very significants between level of knowledge MPP with completeness partograph ($p=0,00$). Based on grammatical and by system interpretation with azas of *lex specialis derogat legi generalis*, MPP have authority to flatten MR for interest the case in health services. Based on results of this research could be follow up to MPP to always increase the level of education and knowledge, as well as made partograph completely in accordance with the current regulation.

Key words: education, knowledge, midwife private practice, authority, partograph